

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasari oleh pemikiran bahwa pemerintah daerah jauh lebih memahami potensi, kondisi, dan permasalahan daerahnya sendiri. Oleh sebab itu, setiap daerah juga lebih mengerti besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Konsekuensi dalam pelaksanaan otonomi daerah ini adalah adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang terdesentralisasi, baik secara administratif maupun pemanfaatan yang sebelumnya diatur atau dilakukan oleh Pemerintah Pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, setiap daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak atau retribusi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan. Tujuan dari transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Transfer dana ini merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digalih melalui pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah, dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, dan diharapkan di masa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat dapat diminimalisir guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan. Sementara itu, di lain pihak, banyak daerah yang memiliki kemampuan finansial yang lebih memadai, yang mengakibatkan daerah-daerah semacam itu mengalami kesulitan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahnya, sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah memberikan dana perimbangan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pada pemerintah daerah, serta dapat digunakan untuk meminimalisasi resiko keuangan (*financial distres*).

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh

masyarakat. Pembangunan daerah yang sangat pesat, pasti membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah yang mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan persediaan dana yang besar untuk membiayai kegiatan tersebut. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

Belanja daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Sedangkan belanja tidak langsung pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja.

Berdasarkan data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tahun 2012- 2020, Diketahui perkembangan belanja langsung dan Pedapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Perkembangan Belanja Langsung dan Pendapatan asli daerah
Kabupaten Kupang Tahun 2012 – 2020**

Tahun	Belanja Langsung		PAD	
	Nominal (Rp)	Growth (%)	Nominal (Rp)	Growth (%)
2011	255. 923. 063. 905	-	31,096,115,135.29	-
2012	283. 332. 894. 566	0,91	40,539,822,421.69	30,40
2013	311. 834. 630. 623	0,97	42,968,411,294.60	5,99
2014	373. 307. 380. 194	19,71	59,620,693,840.59	38,75
2015	700. 322. 106. 988, 58	19,73	67,270,792,446.37	12, 83
2016	562. 696. 994. 959	87,54	73,214,731,552.25	8,83
2017	591. 016. 211. 058	5,04	119,098,060,635.3 3	62, 67
2018	304. 689. 380. 362.	5,18	66,182,995,394.25	44,43
2019	250. 640. 512. 8721, 50	-48,47	42,987,886,309	-35,05
2020	283. 332. 894. 566	-17,74	39,461,640,719	-8,20
	Rata- rata	8,10	Rata- rata	27,46

Sumber: Lampiran 1

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perkembangan belanja langsung terjadi sejak tahun 2012 sampai 2016, namun sejak tahun 2018 sampai 2020 mberflutuasi walaupun di tahun 2017 sempat terjadi kenaikan yang sangat kecil. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2013 terjadi penurunan, walaupun tahun 2014, 2017 terjadi pertumbuhan, namun pertumbuhan tahun 2020 dengan nilai yang sangat kecil.

Sedangkan pertumbuhan Belanja Langsung maupun pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupeten Timor Tengah Selatan dapat dikemukakan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2**Perkembangan Belanja Langsung dan PAD
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun 2012 – 2020**

Tahun	Belanja Langsung		PAD	
	Nominal (Rp)	Growth (%)	Nominal (Rp)	Growwh (%)
2011	203.642.854.321	-	83,158,500,072.17	-
2012	173.195.425.107	-14,95	89,389,100,064,57	7,49
2013	149.797.412.861,5	-13,51	81,978,100,064,51	-8,30
2014	151.998.152.027	1,47	102,627,400,063,94	25,20
2015	155.624.693.127	2,38	23,547,770,009,64	-77,05
2016	156.153.913.371,92	0,34	30,078,540,001,36	27,73
2017	184.181.126.446	5,10	22,675,400,009,74	-24,61
2018	259.234.436.477	40,75	59,768,731,197,61	163,58
2019	312.397.208.719,5	20,51	85,915,902,301,98	43,75
2020	363.276.949.451	16,29	195,696,760,351,62	127,78
	Rata- rata	6,49	Rata- rata	31,73

Sumber: Lampiran 2

Pada tabel 1.2 menunjukkan data belanja langsung Kabupaten Timor Tengah Selatan sejak tahun 2013 mengalami pertumbuhan negatif, dan tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang sangat kecil, kecuali di tahun 2018. Namun sejak tahun 2019 sampai 2020 kembali terjadi penurunan. Sedangkan data Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami fluktualisasi yang ekstrim terutama di tahun 2018 dan 2020.

Berdasarkan hal tersebut maka, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan”.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah penelitian ini adalah Analisis Perbandingan Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas maka yang menjadi persoalan penelitian adalah :

1. Seberapa besar perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang ?
2. Seberapa besar perkembangan Belanja Langsung di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang ?
3. Seberapa besar Pengaruh Belanja Langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perolehan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui gambaran empiris perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang.
2. Mengetahui gambaran empiris perkembangan Belanja langsung di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang.
3. Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja langsung di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Kemanfaatan Akademik

Secara akademik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbandingan Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2. Kemanfaatan Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kota Kupang dan sebagai bahan pertimbangan dalam

mengambil kebijakan dalam mendorong perekonomian dan pembangunan daerah.

- b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan Analisis Perbandingan Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis dan sumbangan pemikiran tentang pembangunan ekonomi dan otonomi daerah.